

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 263–268.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 121.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dengan Aparat Penegak Hukum Lain. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1136.

BUKU

Ali, Achmad. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana, 2009.

Anggara, Sahya. Hukum Administrasi Perpajakan. Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Baswir, Revrison. Krisis Keuangan dan Krisis Ekonomi Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.



Kementerian Hukum dan HAM, 2019.

Friedman, Lawrence M. Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial: The Legal System—A Social Science Perspective. Bandung: Nusa Media, 2009.

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Indrati, Maria Farida. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Kusumaatmadja, Mochtar. Pengantar Hukum Indonesia. Bandung: Alumni, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2019.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2003.

Mulyana, A. N. Sanksi Pajak Berbasis Penerimaan Negara. Semarang: Aneka Ilmu, 2014.

Nonet, Philippe, dan Philip Selznick. Law and Society in Transition: Toward Responsive Law. New York: Harper & Row, 1978.

Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa, 1980.

Rahardjo, Satjipto. Penegakan Hukum dan Reformasi Sistem Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.

Soekanto, Soerjono. Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Soetandyo, Wignjosoebroto. Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 1994.

Soetandyo, Wignjosoebroto. Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah. Surabaya: Airlangga University Press, 2002.

Soetandyo, Wignjosoebroto. Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Elsam, 2002.

Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 1985.

Utrecht, E. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1986.

Wignjosoebroto, Soetandyo. Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 1994.

Afdhali, Dino Rizka, dan Taufiqurrohman Syahuri. “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum.” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–561.

Agustine, L. “Implementasi Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, no. 3 (2023): 422–438.

Arliman, Laurensius. “Eksistensi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.” *Jurnal Rechtsvinding* 12, no. 1 (2023): 15–29.

Ashari, S. N. P. “Pengawasan Administratif Keimigrasian di Luar Negeri oleh Pejabat Dinas Luar Negeri: Dinamika Pelaksanaannya di Lapangan.” *Canadian Studies in Population* (2022). https://www.academia.edu/download/91023299/Book_Chapterrr_fix.pdf

Bambang Heriyanto. “Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.” *Pakuan Law Review* (2020).

Ginting, Carolina, dan Antonius Kurniawan. “Analisis Hukum terhadap Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.” *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure* 8, no. 2 (2023): 89–104.

Handayani, Rini. “Keterbukaan Informasi Publik sebagai Wujud Good Governance dalam Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum* 7, no. 1 (2023): 33–45.

Hidayat, Rahmat. “Problematisa Penegakan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 2 (2022): 198–214.

Kurniawan, Itok Dwi. “Expansion the Meaning of Principle Lex Specialis Derogat Legi Generali.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* (2023).

Kusumaningrum, Septiani Indri. “Pemanfaatan Sektor Pertanian sebagai Penunjang Pertumbuhan Perekonomian Indonesia.” *E-Journal Atma Jaya* (2019).

Muslih, Mohammad. “Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch.” *Legalitas* 4, no. 1 (2013).

Nugroho, Bagus. “Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Komitmen dalam Kasus Penyalahgunaan Wewenang.” *Jurnal Yustisia* 13, no. 1 (2023): 45–60.

Nuraini, Siti. “Kajian Kritis terhadap Efektivitas LPSE dalam Mewujudkan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.” *Jurnal Administrasi Negara* 11, no. 4 (2023): 210–224.

Pattipawae, D. Rosiana, Abdullah Salmon, H. Lainsamputty, dan N. Lainsamputty. “Due to the Legal Non-Compliance of State Administrative Officers with the Implementation of



Rachman, Fajar. “Analisis Implementasi Prinsip Value for Money dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.” *Jurnal Kebijakan Publik* 9, no. 2 (2023): 75–90.

Radbruch, Gustav. “Legal Philosophy.” Diterjemahkan oleh Kurt Wilk. Athens: University of Georgia Press, 1950.

Randy Febriansyah. “Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch.” *Jurnal Ilmu Hukum* (2020).

Sari, Dian Pratiwi. “Pengawasan Internal dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 10, no. 3 (2023): 145–160.

Susanto, S. N. “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi.” *Administrative Law & Governance Journal* (2019).

Teguh Apriyanto, dan Retno Saraswati. “Kajian Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Keimigrasian: Suatu Tinjauan Komparasi Hukum Administrasi Negara.” *Jurnal Hukum Progresif* (2023).

Utami, Rina. “Tinjauan Hukum terhadap Mekanisme E-Procurement di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Teknologi* 8, no. 2 (2023): 122–135.

Wibowo, Fery. “Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa.” *Jurnal Integritas* 9, no. 1 (2023): 61–75.